

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir Tahun 2019, dunia dikejutkan oleh kemunculan virus jenis baru yang bernama *Corona Virus Diseases 19*, yang selanjutnya dikenal dengan virus Covid-19, virus ini awalnya muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.¹ Dengan penyebaran Virus ini yang begitu cepat World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan Covid-19 sebagai *pandemic* global.² Gambaran klinis mengenai gejala Covid-19 antara lain: demam, batuk, keringat, sakit tenggorokan, sakit kepala, kelelahan, diare, mual, kehilangan nafsu makan, kehilangan indra penciuman hingga sesak nafas.



Di Indonesia, kasus virus Covid-19 pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, dimana Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus warga negara Indonesia yang terinfeksi virus Covid-19.³ Hingga akhirnya melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam

¹ Ririn Novita Putri, 2020, Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19, jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi 20(2), 705-709

² Glorya setyvani Putri, WHO Resmi Sebut Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Kompas.com(Diakses Pada 20 Januari 2022 Pukul 22.00 WIB)

³ RaKhmad Hidayatulloh Permana, Cerita Awal Corona di Indonesia, news.detik.com (Diakses Pada 25 Januari 2022 Pukul 15:23 WIB)

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional, presiden Joko Widodo menyatakan bahwa status Virus Covid-19 menjadi bencana Nasional.⁴ Tercatat hingga tanggal 25 Januari 2020, virus Covid-19 sudah menyebar di 227 negara, dengan sebanyak 352.796.704 kasus positif, dan 5.600.434 jiwa meninggal dunia.⁵

Sebagai upaya menanggulangi virus Covid-19, pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai macam usaha di antaranya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat berbasis Mikro (PPKM). Kemudian sosialisasi pengenalan 5M, yaitu anjuran untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas⁶.

Namun demikian, usaha tersebut belum maksimal dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19. Oleh karena itu, pemerintah melakukan usaha vaksinasi kepada masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah juga menetapkan peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus*



⁴ CNN Indonesia, Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia, cnnindonesia.com, (Diakses Pada 26 Januari 2022, Pukul 12:30 WIB)

⁵ Data Sebaran Covid 19 Kemenkes RI, <https://covid19.go.id/> (Diakses Pada 22 Januari 2022, pukul 19.00 WIB)

⁶ Tahfsin Alfarizi, 5M di Massa Pandemi Covid-10 di Indonesia, kemenkes.go.id (Dikases Padda 29 januari 2022, Pukul 22.27 WIB)

Disease 2019 (Covid-19) sebagai kebijakan lanjut guna mengatur kewenangan Pemerintah, Kementrian, Lembaga, dan Para Pejabat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganismen yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganismen yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁷ Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.⁸ Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan vaksinasi demi mencegah penyebaran Virus Covid-19. Adapun perbandingan jumlah vaksinasi Covid 19 yang dilakukan pemerintahan Indonesia dengan negara-negara lain dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1. 1 Peringkat Penggunaan Dosis Vaksinasi di Dunia

⁷ Permenkes No. 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁸ Ibid

No	Negara	Dosis Diberikan	Divaksinasi Lengkap	Persentase Populasi Divaksinasi Lengkap
1	China	3,04 M	1,23 M	87,0 %
2	India	1,73 M	753 jt	54,6 %
3	Amerika Serikat	547 jt	213 jt	64,7 %
4	Brazil	378 jt	152 jt	71,7 %
5	Indonesia	331 jt	152 jt	49,6 %

Sumber: Data WHO 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan China merupakan negara yang paling berhasil dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 dengan jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan sebanyak 3,4 Miliar dosis, sedangkan untuk jumlah vaksinasi yang sudah lengkap sebanyak 1,23 Miliar dan untuk persentase populasi divaksinasi lengkap sebanyak 87,0%. Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19, Indonesia menempati posisi ke lima dengan jumlah vaksinasi terbanyak yaitu sebanyak 331 juta dosis, namun persentase populasi divaksinasi lengkap sebesar 49,6 % sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Indonesia belum maksimal.

Belum maksimalnya pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan suplai vaksin yang ada di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Kesehatan RI dalam wawancaranya bersama kompas.com tanggal 12 juli 2021.

“Terkait dengan program vaksinasi ini, mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya kenapa program vaksin di Indonesia lama. Hal ini bukan karena kita tidak memiliki anggaran tapi permasalahan ada

di suplai vaksinnya. Pada awal program vaksinasi selama 8 minggu, Indonesia hanya dapat menyuntikkan 10 juta vaksin.”⁹

Menurut Menteri Kesehatan, dalam bulan pertama program vaksinasi di awal tahun 2021, vaksin yang didapat Indonesia hanya 3 juta dosis. Kemudian pada bulan Juli vaksinasi yang disiapkan lebih dari 33 juta dosis, dengan target 1 juta vaksin per hari dapat terpenuhi.¹⁰ Meskipun suplai vaksin yang tersedia sudah cukup banyak, namun ternyata tingkat vaksinasi di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Kesehatan RI kepada Merdeka.com bahwa sebanyak 208.205.720 rakyat Indonesia ditargetkan pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap mendapatkan kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Akan tetapi, hanya 57.409.303 orang yang telah mendapatkan dua dosis vaksinasi COVID-19. Dengan demikian, tingkat vaksinasi COVID di Indonesia baru mencapai 27,57 persen dari jumlah yang ditargetkan.¹¹

Belum maksimalnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, juga dipengaruhi oleh belum maksimalnya pelaksanaan vaksinasi pada tingkat Pemerintahan Provinsi. Salah satu Provinsi yang mendapat peringatan dari Menteri Kesehatan RI adalah Provinsi Sumatra Barat, hal ini disebabkan lantaran Provinsi Sumbar tercatat sebagai provinsi kedua terendah di antara 34 Provinsi lainnya dalam capaian program vaksinasi Covid-19 dosis pertama nasional.¹² Hal



⁹Gloria Setyani Putri, Program Vaksinasi Indonesia kenapa Lambat? Ini Jawaban Menkes Budi, kompas.com,(Diakses Pada 29 Januari 2021, Pukul 12:30 WIB)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Dedi Rahmadi, Update Jumlah Vaksinasi di Indonesia Per 10 Oktober 2021, merdeka.com, (Diakses pada 1 Maret 2022, Pukul 17.45 WIB)

¹²CNN Indonesia, Menkes tegur Vaksin Dosis 1 Covid Sumbar Terendah Kedua di RI, cnnindonesia.com.(Diakses pada 1 Maret 2022, Pukul 16:00 WIB)

ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada kutipan berikut:

“Kalau saya lihat, di Sumbar target yang divaksinasi ada 4.4 juta yang sudah divaksinasi. Dosis pertama 1,1 juta, dosis kedua sekitar 560 ribu. Jadi, saya minta tolong semua diajak untuk divaksinasi, ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain.”¹³

Setelah Sumbar mendapat peringatan dari Menkes per Oktober 2021, terjadi peningkatan pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari peringkat dua terendah ke peringkat 1, dari bawah, atau peringkat ke-23 dari 34 Provinsi di Indonesia pada bulan Februari 2022 (Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Data Peringkat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
per 14 februari 2022

No	Dosis 1		Dosis 2	
	Provinsi	Persentase	Provinsi	Persentase
1	DKI Jakarta	147,51%	DKI Jakarta	123,1%
2	Bali	114,76%	Bali	103,42%
3	DI. Yogyakarta	110,07%	DI. Yogyakarta	98,74%
4	Kepulauan Riau	108,56%	Kepulauan Riau	88,32%
5	Kalimantan Timur	94,71%	Kalimantan Timur	79,35%
6	Kep. Bangka Belitung	93,35%	Jawa Tengah	72,14%
7	Sumatera Selatan	91,44%	Kep. Bangka Belitung	72,1%
8	Kalimantan Utara	91,02%	Kalimantan Utara	68,76%
9	Kalimantan Tengah	90,78%	Jawa Timur	67,77%
10	Nusa Tenggara Barat	90,34%	Jambi	63,31%
11	Riau	90,3%	Jawa Barat	62,77%
12	Jawa Tengah	90,37%	Sumatera Utara	61,85%
13	Sumatera Utara	90,23%	Banten	61,77%
14	Banten	89,47%	Nusa Tenggara	61,64%

¹³ Ibid.

			Barat	
15	Jambi	89,36%	Riau	61,35%
16	Jawa Timur	89,05%	Kalimantan Tengah	60,18%
17	Aceh	88,44%	Bengkulu	59,1%
18	Jawa Barat	88,04%	Lampung	58,3%
19	Lampung	87,22%	Sumatera selatan	57,66%
20	Gorontalo	87,03%	Kalimantan Barat	57,54%
21	Bengkulu	86,96%	Sulawesi Utara	56,57%
22	Kalimantan Selatan	85,13%	Gorontalo	54,95%
23	Sulawesi Utara	84,91%	Sulawesi Selatan	53,64%
24	Sumatera Barat	83,78%	Sumatera Barat	52,11%
25	Sulawesi Selatan	82,49%	Nusa Tenggara Timur	49,83%
26	Sulawesi Tengah	81,99%	Kalimantan Selatan	48,09%
27	Nusa Tenggara Timur	81,49%	Sulawesi Tenggara	47,94%
28	Sulawesi Tenggara	81,15%	Sulawesi Tengah	46,75%
29	Kalimantan Barat	80,46%	Sulawesi Barat	44,17%
30	Maluku Utara	79,05%	Aceh	42,18%
31	Sulawesi Barat	74,34%	Maluku Utara	41,94%
32	Maluku	67,49%	Papua Barat	38,46%
33	Papua Barat	57,96%	Maluku	37,79%
34	Papua	30,93%	Papua	22,39%

Sumber : Data Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Meskipun terjadi peningkatan, namun dapat dikatakan peningkatan yang terjadi belum terlalu signifikan. Jika kita melihat data di atas, persentase vaksinasi kedua Provinsi Sumatra Barat masih belum mencapai target *herd immunity* yaitu 70% persentase vaksinasi ke-dua sehingga dapat diambil kesimpulan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi sumatera Barat belum berjalan dengan baik. Adapun Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Persentase dan Jumlah Vaksinasi Covid-19 Pertama di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Persentase	Jumlah
1	Kota Padang	96,95%	704.451
2	Kabupaten Agam	71,09%	301.115
3	Kabupaten Pesisir Selatan	76,66%	306.698
4	Kabupaten Pasaman Barat	81,66%	271.971
5	Kabupaten Padang Pariaman	77,70%	266.203
6	Kabupaten Lima Puluh Kota	81,28%	252.465
7	Kabupaten Solok	72,92%	227.369
8	Kabupaten Tanah Datar	72,27%	221.382
9	Kabupaten Pasaman	80,26%	188.813
10	Kabupaten Sijunjung	84,95%	157.241
11	Kabupaten Dharmasraya	85,82%	153.844
12	Kota Bukittinggi	121,19%	115.994
13	Kabupaten Solok Selatan	78,99%	113.713
14	Kota Payakumbuh	96,16%	105.835
15	Kota Solok	111,43%	65.555
16	Kota Pariaman	99,02%	73.905
17	Kota Padang Panjang	128,29%	56.529
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	79,86%	54.711
19	Kota Sawahlunto	104,27%	54.015

Sumber : Data Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat jumlah vaksinasi Covid-19 pertama terbanyak adalah Kota Padang yaitu 704.451 orang dengan persentase 96,95 %. Untuk pelaksanaan vaksinasi ke dua di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Persentase dan Jumlah Vaksinasi Covid-19 Kedua di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Persentase	Jumlah
1	Kota Padang	62,54%	454.435
2	Kabupaten Pesisir Selatan	48,09%	192.395
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	60,44%	187.737
4	Kabupaten Pasaman Barat	55,70%	185.511
5	Kabupaten Agam	37,94%	163.895
6	Kabupaten Tanah Datar	50,40%	154.382
7	Kabupaten Solok	43,28%	134.950
8	Kabupaten Padang Pariaman	35,73%	122.395
9	Kabupaten Sijunjung	59,50%	110.131
10	Kabupaten Pamanasa	54,10%	97.149
11	Kabupaten Pasaman	41,14%	97.019
12	Kabupaten Solok Selatan	58,42%	84.098
13	Kota Payakumbuh	68,53%	75.433
14	Kota Bukittinggi	70,56%	67.534
15	Kota Sawahlunto	82,05%	42.505
16	Kota Solok	71,16%	40.588
17	Kota Padang Panjang	82,38%	56.302
18	Kota Pariaman	43,19%	32.234
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	45,05%	30.864

Data :Kementerian Kesehatan 2022

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah vaksinasi terbanyak untuk vaksinasi kedua adalah Kota Padang dengan Jumlah 454.435 dan persentase 62,54%. Dari Tabel 1.3 dan 1.4 dapat dilihat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang dapat dikatakan cukup baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini terbukti dengan capaian vaksinasi Kota Padang tergolong tinggi baik pada vaksinasi pertama maupun kedua, yaitu untuk baksin pertama 96,95% untuk Vaksin pertama dan 62,54% untuk vaksin kedua.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang sangat penting mengingat Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat di mana tingkat aktivitas penduduk yang sangat tinggi sehingga peluang penyebaran Covid-19

sangat tinggi. Selain itu, Kota Padang juga memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi di Sumatera Barat, adapun perbandingan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
Kota Padang	913.448
Kabupaten Agah	531.202
Kabupaten Pesisir Selatan	509.618
Kabupaten Pasaman Barat	436.313
Kabupaten Padang Pariaman	433.018
Kabupaten Solok	394.237
Kabupaten Lima Puluh Kota	385.634
Kabupaten Tanah Datar	373.693
Kabupaten Pasaman	303.103
Kabupaten Sijunjung	237.313
Kabupaten Dharmasraya	231.217
Kabupaten Solok Selatan	184.854
Kota Payakumbuh	141.184
Kota Bukittinggi	121.588
Kota Pariaman	95.294
Kabupaten Kepulauan Mentawai	88.389
Kota Solok	74.469
Kota Sawahlunto	65.687
Kota Padang Panjang	56.971

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Keberhasilan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sangatlah penting guna mencegah penyebaran kasus baru di Kota Padang dan mengurangi peluang

bertambahnya korban jiwa dari virus Covid-19 tersebut. Keberhasilan pengelolaan program vaksinasi Covid-19 di Kota Padang erat kaitanya dengan bagaimana proses manajemen program tersebut karena dengan proses manajemen yang baik maka pelaksanaan dari program yang direncanakan dari awal akan terlaksana dengan baik pula.

Program vaksinasi Covid-19 merupakan program nasional dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, namun dalam pelaksanaannya program ini dilaksanakan pada tingkatan daerah provinsi maupun tingkatan kabupaten/kota. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan. Pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki peran penting dalam berjalanya program tersebut, hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Padang memegang tanggung jawab urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam upaya meningkatkan angka Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan terobosan, diantaranya yaitu melakukan program vaksinasi Mobile, vaksinasi mobile merupakan upaya jemput bola ke masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Hj.Ferimulyani H, MBIomed:

“dalam rangka meningkatkan jumlah vaksinasi di Kota padang kami membuat program vaksinasi mobile, dimana dalam kegiatan vaksinasi ini, puskesmas selaku vaksinator langsung mendatangi untuk melakukan kegiatan. (Wawancara dengan Hj.Ferimulyani H, MBIomed selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang)

Dengan dilaksanakannya program vaksinasi Mobile ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan juga pemberian vaksinasi dapat menjangkau masarakat lebih luas. Selain vaksinasi mobile, terobosan lain yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang adalah dengan menghimbau masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin untuk membaawa dua lansia, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Hj.Ferimulyani H, MBIomed:

"Bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi tapi bukan termasuk golongan lansia maupun petugas pelayanan publik, dapat kita berikan vaksinasi namun harus membawa minimal dua orang lansia yang bersedia melakukan vaksinasi."¹⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui untuk mencapai target kelompok usia lansia, Dinas Kesehatan memberikan himbauan kepada maasayakat yang ingin melakukan vaksinasi agar membawa dua orang lansia untuk divaksin, dengan demikian, Dinas Kesehatan dapat menjangkau kelompok umur lansia yang merupakan kelompok yang rentan akan menjadi korban dari virus Covid-19 untuk diberikan vaksin.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 Dinas kesehatan Kota Padang Memebentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021 melalui Keputusan kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor : 443/127.2/DKK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021, hal ini sesuai dengan

¹⁴ Irwan Rais Padang.go.id, DKK Akan Genjot Vaksinasi Lansia, padang.go.id.(Diakses Pada 25 Maret 2022 pukul 16.00 WIB)

pernyataan dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

“Pembentukan kelompok kerja ini didasarkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam kelompok kerja ini dibentuk bidang-bidang yang mengerjakan kegiatan yang telah dituliskan di dalam SK Kepala Dinas tersebut.”(Wawancara dengan dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang pada 18 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui, dalam melaksanakan program vaksinasi ini, dinas kesehatan membentuk kelompok kerja yang dimana dalam kelompok kerja tersebut dibagi dalam berbagai bidang yang memilekaskan kegiatannya masing-masing, hal ini sejalan dengan salah satu proses manajemen yang dikemukakan oleh GR. Terry yaitu pengorganisasian dimana pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan.

Dalam pelaksanaan teknis Vaksinasi Covid-19 di lapangan dilaksanakan oleh Puskesmas selaku Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang. Adapun Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Vaksinasi di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 6 : Puskesmas Dan Wilayah Tugas di Kecamatan Kota Padang

No	Kecamatan	Puskesmas
1	Bungus	Bungus
2	Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan
3	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung
		Pengambiran
4	Padang Selatan	Seberang Padang

		Pemancing
		Rawang Barat
5	Padang Timur	Andalas
6	Padang Barat	Padang Pasir
7	Padang Utara	Ulak Karang
		Air Tawar
		Alai
8	Nanggalo	Nanggalo
		Lapai
9	Kuranji	Belimbing
		Kuranji
		Ambacang
10	Pauh	Pauh
11	Koto Panjang	Sandangin
		Lubuk Buaya
		Koto Panjang Iku Koto
		Anak Air
		Dadok Tunggul Hitam

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2022

Pada Tabel 1.6 dapat dilihat terdapat 23 puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan yang berwilayah tugas di 11 kecamatan Kota Padang. Adapun capaian pelaksanaan vaksinasi covid-19 per-kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Capaian Vaksinasi Per-Kecamatan di Kota Padang
(31 Desember 2021)

No	Kecamatan	Dosis 1	Dosis 2	% vaksin 1	% Vaksin 2
1	Bungus	11.957	7785	59,73%	38,89%
2	Koto Tengah	78.562	54.551	55,13%	38,28%
3	Kuranji	64.896	45.329	58,03%	40,53%
4	Lubuk Begalung	58.629	44.100	62,69%	47,16%
5	Lubuk Kilangan	42.944	19.613	62,59%	45,67%
6	Nanggalo	27.798	20.928	55,93%	42,11%
7	Padang Barat	23.801	18.614	62,87%	49,17 %
8	Padang Selatan	33.774	26.047	68,05%	52,48%
9	Padang Timur	39.910	29.885	60,03%	44,95%
10	Padang Utara	27.383	20.667	46,12%	34,83%
11	Pauh	30.493	22.513	57,80%	42,67%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2022

Pada Tabel 1.6 dapat dilihat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Per-Kecamatan di Kota Padang masih belum maksimal di mana masih terdapat kecamatan dengan persentase vaksinasi Covid-19 yang masih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Untuk kecamatan dengan persentase vaksinasi Covid-19 yang paling tinggi adalah Kecamatan Padang Selatan di mana pada vaksinasi pertama sebesar 68,05% dan untuk vaksinasi kedua dengan persentase 52,48%, Kemudian kecamatan dengan capaian vaksinasi terendah di Kota Padang adalah Kecamatan Padang Utara dengan persentase vaksinasi pertama sebesar 46,12% sedangkan untuk vaksinasi kedua sebesar 34,83 %. Pelaksanaan vaksinasi di tingkat kecamatan tentu tidak lepas dari peranan Puskesmas selaku Pelaksana vaksinasi yang terdapat di setiap kecamatan di kota Padang, adapun pelaksanaan vaksinasi pada puskesmas di kota padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Jumlah Vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua Pada puskesmas Puskesmas di Kota Padang

No	Puskesmas	Dosis 1	Dosis 2	Total
1	Andalas	22582	15291	37873
2	Lubuak Buaya	20221	14171	34392
3	Lubuk Kilangan	19852	14116	33968
4	Pauh	19537	13026	32563
5	Padang Pasir	18183	13845	32028
6	Pegambiran	17403	13752	31128
7	Lubuk Begalung	17308	11810	29118
8	Siteba	16886	11866	28752
9	Ambacang	16481	12130	28611
10	Air Tawar	15387	10975	26362
11	Alai	13326	10849	24175
12	Air Dingin	13474	10134	23608
13	Belimbing	14391	9210	23601
14	Seberang Padang	13138	10335	23473

15	Ulak Karang	12390	10265	22655
16	Rawang Barat	13398	9047	22445
17	Dadok	12296	9166	21462
18	Anak Air	12440	8941	21381
19	Lapai	10824	9079	19903
20	Kuranji	11812	7404	19216
21	Bungus Taluak Kabuang	11147	7980	19127
22	Ikur Koto	11040	8023	19063
23	Pemancangan	9613	6994	16607

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan jumlah yang paling banyak dilaksanakan pada Puskesmas di Kota Padang adalah Puskesmas Andalas di Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan jumlah vaksinasi pertama sebanyak 22582 dosis dan Pada Vaksinasi Kedua sebanyak 15.291 dosis, kemudian untuk posisi kedua yaitu puskesmas Lubuk Buaya dengan jumlah vaksinasi pertama sebanyak 20221 dosis dan untuk Vaksinasi Kedua sebanyak 14.171 dosis, Kemudian untuk Posisi ketiga ditempati oleh Puskesmas Lubuk Kilangan dengan jumlah Pada Dosis pertama yaitu sebesar 19.852 dosis dan untuk dosis kedua sebesar 14.116 dosis.

Dalam melaksanakan perencanaan Program Vaksinasi Covid-19, Dinas Kesehatan Kota Padang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sumber daya yang akan digunakan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Tut Wuri Handayani selaku Kepala bidang pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang :

“Sebelum melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19, tentunya kami melakukan perencanaan supaya kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan baik, pada perencanaan kami

memrencanakan berbagai hal, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana waktu, tempat dan lain sebagainya”.(hasil Wawancara dengan ibuk Tut Wuri Handayani SKM.MKes, 23 Februari)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perencanaan Dinas Kesehatan Kota Padang telah melakukannya dengan baik yaitu dengan menganalisa sumber daya yang diperlukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam fungsi perencanaan perlu menganalisa sumberdaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 ini. Adapun untuk sumberdaya tersebut adalah; Manusia (*Man*), Sumber Dana (*Money*) dan alat-alat (*Material*). Dalam melaksanakan program vaksinasi covid-19 Dinas kesehatan membentuk kelompok kerja yang melaksanakan program ini, hal ini juga disampaikan oleh dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

Pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini, Dinas Kesehatan membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor: 443/127.2/DKK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021. (Hasil Wawancara dengan buk dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang pada 18 Mei 2022)

Kemudian, dalam meningkatkan pemahaman tim pelaksana teknis vaksinasi Covid-19, Dinas Kesehatan Kota Padang memeberikan pelatihan kepada puskesmas puskesmas yang ada di Kota padang mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi tersebut, Hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibuk Handayani

Selaku Kepala Kepala Bidang Pelaksanaan Pokja Vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

“Ada, kami memberikan pelatihan pada puskesmas puskesmas yang akan melakukan vaksinasi ini untuk memberikan pemahaman teknis vaksinasi tersebut” (hasil Wawancara dengan ibuk Handayani, 25 Februari 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberikan pelatihan pemahaman teknis vaksinasi kepada puskesmas puskesmas kota padang sebelum melakukan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk memahami teknis dari pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Untuk sumberdaya sumber dana (*Money*), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan demikian dapat dilihat keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini. Untuk sumberdaya Alat Alat (*Material*), bersumber dari dua sumber yakni dari pusat maupun dari Dinas Kesehatan itu sendiri.

Pada variabel pengorganisasian terdapat kegiatan pembagian kerja, adapun dalam program Vaksinasi Covid-19 ini pembagian kerja telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor: 443/127.2/DKK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021, hal ini senada dengan

penyataan dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

:dalam kelompok kerja ini kami membagi tugas berdasarkan posisi/jabatan sebelumnya yang anggota tempati di dalam dinas, sehingga para anggota kelompok kerja lebih memahami tugas mereka di dalam kelompok kerja ini” (wawancara dengan ibuk dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang pada 18 Mei 2022)

Dari wawancara tersebut pembagian kerja yang dilakukan dalam kelompok kerja telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan posisi anggota kelompok kerja keahlian yang sesuai dengan jabatannya di dalam dinas sehingga para anggota dapat memahami tugas yang akan dilaksanakan dengan baik.

Kemudian pada fungsi penggerakan diperlukan adanya komunikasi agar pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik. Arah informasi dan perintah yang jelas dapat dilakukan dengan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, secara formal maupun tidak formal. Adanya transfer informasi dalam pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dilakukan dalam rapat secara formal maupun melalui Telephone, seperti yang dijelaskan oleh ibuk tut Wuri Handyani selaku Kepala bidang Pelaksanaan pokja Vaksinasi Covid-19 Kota Padang :

“Biasanya secara formal kami melakukan komunikasi dalam rapat, kadang kadang kami juga melakukan komunikasi lewat telepon kepada puskesmas supaya lebih efektif.”(hasil Wawancara dengan ibuk Handayani, 25 Februari 2022).

Dari wawancara diatas dapat dilihat pentingnya komunikasi secara langsung seperti dalam rapat. Namun untuk menggerakan anggota juga dapat

dilakukan dengan komunikasi non formal seperti menggunakan telephone yang dinilai efektif karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, asalkan komunikasi terjalin dengan baik.

Kemudian pada Fungsi Pengawasan, Dinas kesehatan Kota Padang membentuk tim Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tim tersebut bertugas untuk mengawasi teknis pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di puskesmas puskesmas Kota Padang seperti yang dijelaskan oleh Dr Desi M Sidik Selaku ketua Bidang monitoring dan evaluasi kelompok Kerja pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

“Dalam melakukan pengawasan, Dinas Kesehatan membentuk tim dalam mengawasi pelaksanaan vaksinasi di puskesmas agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan maka kami memberi teguran atau peringatan kepada puskesmas yang bersangkutan (hasil Wawancara dengan ibuk Dr Desi M Sidik, 25 Februari 2022)

Bedasarkan wawancara tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Dinas Kesehatan Kota Padang Kepada Puskesmas selaku pelaksana teknis diiringi dengan pemberian sanksi berupa teguran atau nasehat..Dari fenomena yang peneliti temukan peneliti menemukan kecocokan fenomena dilapangan dengan teori fungsi manajemen menurut G.R Terry yaitu perencanaan (*Planning*), Pengorganisaian (*Organizzing*), Penggerakan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Dengan capaian positif dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang peneliti memfokuskan pada kajian manajemen dengan judul **Manajemen Program Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan Manajemen Program Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Padang?”

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen Program Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.

1. 4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik, dengan demikian peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa administrasi publik lainnya, selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang relevan yang selanjutnya terkait dengan penelitian ini.

1. 4. 2 .Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan, acuan, dan menjadi sumbangan fikiran bagi instansi terkait.

